

EVIDENCE-BASED LIBRARY MANAGEMENT: URGENSI DAN TANTANGAN PENERAPANNYA DI INDONESIA

Yaniasih^{1,2*}

¹Magister Teknologi Informasi Perpustakaan, Institut Pertanian Bogor

²Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

*Korespondensi: yaniasih12p@apps.ipb.ac.id

ABSTRACT

Evidence - based library management (EBLM) is a relatively new concept in the library management. This concept has been implemented in several countries to improve the quality of library services, the quality of librarians, and the quality of publications in field of library and information science. This study discusses the urgency of implementing EBLM in Indonesia and its challenges. The study use literature and secondary data method. The secondary data which used consists of the availability and the access to scientific evidences as well as the quantity and quality of human resources. Results of the data and theory triangulation was then analyzed descriptively. The results argue that EBLM is important to be implemented in Indonesia and might be a potential to overcome the existing problems of librarianship, particularly in LIPI. The implementation will face some challenges such as the limited scientific evidences and the ideology of librarian or library leader. The study also provides several recommendations to support EBLM implementation on national scale, library organizations, and professional organizations.

ABSTRAK

Evidence-based library management (EBLM) merupakan konsep yang relatif baru dalam manajemen perpustakaan. Konsep ini sudah diterapkan di beberapa negara untuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan, kualitas profesi pustakawan, dan kualitas publikasi ilmu perpustakaan dan informasi. Kajian ini membahas urgensi penerapan EBLM di Indonesia dan tantangan yang ada. Metode yang digunakan adalah studi literatur dan data sekunder. Data sekunder yang digunakan terdiri dari ketersediaan dan akses terhadap bukti ilmiah serta kuantitas dan kualitas sumber daya manusia. Hasil triangulasi data dan teori ini kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil kajian memberikan kesimpulan bahwa EBLM penting untuk diterapkan di Indonesia dan potensial untuk mengatasi permasalahan kepastakawanan, khususnya di LIPI. Tantangan penerapan EBLM adalah rendahnya bukti ilmiah yang tersedia serta persepsi dan sikap pustakawan terhadap penelitian. Kajian ini juga memberikan rekomendasi yang dapat dilakukan baik dalam skala nasional, organisasi perpustakaan, maupun organisasi profesi.

Keywords: Evidence-based library management; Librarianship; Librarian; Research; Publication

1. PENDAHULUAN

Era digitalisasi dan kemudahan akses informasi telah mengubah persepsi manusia terhadap perpustakaan dan sumber informasi. Survei menunjukkan bahwa sebagian besar orang lebih menyukai mencari informasi melalui mesin pencari dan sangat sedikit yang langsung mengakses situs web perpustakaan untuk memperoleh informasi. Mereka lebih suka dengan model swalayan dalam mendapatkan informasi (OCLC, 2010). Di Indonesia juga menunjukkan kondisi serupa. Salah satu contohnya, peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyukai mencari informasi di internet. Sebagian besar peneliti tidak pernah datang ke perpustakaan. Peneliti di LIPI hanya sedikit yang memanfaatkan layanan di perpustakaan dan jarang berinteraksi dengan pustakawan (Yaniasih, dkk., 2012).

Kondisi tersebut seharusnya mendorong perpustakaan untuk mendefinisikan kembali visi-misi dan bisnis utamanya. Namun demikian hal ini merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Mengembangkan

sebuah visi-misi, rencana strategis, sampai bentuk program dan layanan perpustakaan adalah pengambilan keputusan besar dan memiliki dampak yang juga besar. Banyak organisasi yang runtuh karena pengambilan keputusan tidak berdasarkan bukti yang baik namun berdasarkan pengalaman masa lalu, insting, atau asumsi (Yildiz, 2012). Pengambilan keputusan dalam manajemen organisasi secara tradisional umumnya memang berdasarkan kepada insting, asumsi, diskusi yang tidak fokus, jarang menggunakan data dan analisis yang sistematis (Lakos, 2007). Hal ini juga banyak dilakukan dalam manajemen perpustakaan. Oleh karena itu, muncul ide penggunaan bukti dalam manajemen perpustakaan yang disebut *evidence-based library management* (EBLM).

EBLM merupakan konsep yang relatif baru dalam manajemen perpustakaan dan merupakan salah satu isu perkembangan terkini dalam ilmu perpustakaan dan informasi (IPI). Intinya merupakan ide yang sederhana, yaitu menggunakan bukti yang tepat untuk pengambilan keputusan daripada mendasarkan keputusan pada apa yang orang lain lakukan, atau yang selama ini dilakukan, atau yang dipikir/dipercaya benar (Pfeffer dan Sutton, 2006). EBLM lebih menekankan pada manajemen organisasi perpustakaan, sedangkan istilah lebih luasnya adalah *evidenced-based librarianship* (EBL) atau *evidence-based library and information practice* (EBLIP) yang mengacu pada penggunaan bukti, khususnya bukti ilmiah hasil penelitian dalam setiap aspek kepustakawanan (Patridge, 2007).

EBLM sudah banyak dipelajari, diterapkan, dan dikembangkan di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Inggris Raya, Swedia, Kanada, Australia, Jepang, dan Iran (Eldredge, J. 2012). Di Indonesia, kepustakawanan juga menghadapi banyak permasalahan serius termasuk dalam hal manajemen (ISIPIL, 2009; Sulistyono-Basuki, 2013). Penerapan EBLM di Indonesia perlu dilakukan kajian. Hasil penelusuran di beberapa mesin pencari dan katalog perpustakaan besar di Indonesia, dengan menggunakan beberapa variasi kata kunci terkait EBL tidak ditemukan. Hal ini mengindikasikan bahwa di Indonesia belum ada publikasi atau kajian mengenai EBL atau EBLM. Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah kajian ini adalah:

- 1) Apakah EBLM penting untuk diterapkan di Indonesia?
- 2) Apakah tantangan yang dihadapi dalam menerapkan EBLM di Indonesia?
- 3) Apa langkah yang dapat dilakukan untuk menerapkan EBLM di Indonesia?

Adapun tujuan dilaksanakannya kajian ini, yaitu: a) menganalisis urgensi penerapan EBLM di Indonesia; b) mengidentifikasi tantangan dalam penerapan EBLM; dan c) mengajukan rekomendasi langkah penerapan EBLM dan EBL di Indonesia.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Evidence-Based Librarianship* (EBL)

Evidence-based merupakan konsep yang berkembang pada awal tahun 1990-an. Konsep ini dimulai di bidang kedokteran dan kesehatan yang dikenal dengan *evidence-based medicine/EBM* dan *evidence-based health care/EBHC*. Penerapannya disebut *evidence-based practice* (EBP) yang meluas di berbagai bidang ilmu dan profesi, seperti bisnis, pendidikan, manajemen sumber daya manusia (SDM), dan sosial. Istilah *evidence-based librarianship* (EBL) muncul pada tahun 1997 oleh Eldredge (2012). EBL pertama kali diterapkan di perpustakaan khusus bidang kesehatan yang terinspirasi oleh praktek EBM dan EBHC. Pada tahun 2003, Booth mengusulkan alternatif istilah baru untuk EBL menjadi *evidenced-based library and information practice* (EBLIP) (Yildiz, 2012; Eldredge, 2012).

Crumley & Koufogiannakis (2002) menyatakan ada dua definisi utama dari EBL. Untuk menghindari kesalahan definisi, berikut kutipan langsung kedua definisi tersebut.

- 1) “*EBL constitutes an applied rather than theoretical science. EBL merges scientific research with the pressing need to solve practical problems. ... EBL provides a framework for self-correction as new information becomes available that suggests new directions or methods* (Eldredge, 2000) “.
- 2) “*EBL is an approach to information science that promotes the collection, interpretation, and integration of valid, important and applicable user-reported, librarian-observed, and research-derived evidence. The best available evidence, moderated by user needs and preferences, is applied to improve the quality of professional judgement* (Booth, A. 2000)”.

Berdasarkan kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa EBL adalah suatu konsep untuk menggunakan bukti, terutama informasi ilmiah yang dihasilkan oleh penelitian, untuk menyelesaikan permasalahan dalam kepustakawanan. Ada enam area kepustakawanan yang dapat menerapkan EBL yaitu referensi, koleksi, temu kembali dan akses informasi, pendidikan, pemasaran/promosi, dan manajemen (Crumley dan Koufogiannakis, 2002).

2.2 Evidence-Base Library Management (EBLM)

Salah satu penerapan EBL dalam kepustakawanan adalah dalam manajemen yang disebut EBLM. Penerapan EBLM di perpustakaan dapat memberikan beberapa manfaat. Pertama, penggunaan bukti ilmiah akan menaikkan prestise perpustakaan dimata pengguna; khususnya akademisi, industri, dan peneliti; yang sudah terbiasa melaksanakan aktivitasnya berbasis data yang valid. Kedua, bukti dapat digunakan untuk mengevaluasi program dan layanan sesuai dengan kebutuhan pengguna (Fisher dan Robertson, 2007).

Pfeffer dan Sutton (2006) mengidentifikasi hambatan utama dalam penerapan EBLM adalah ideologi. Banyak orang lebih mengandalkan pengalaman masa lalu dalam bekerja. Mereka sulit untuk menerima dan mengubah cara bekerja sesuai dengan metode dan cara-cara baru. Ideologi ini akan membuat mereka hanya mau menerima hal baru yang sesuai dengan yang mereka percayai sebelumnya.

Peranan terbesar dalam penerapan EBLM adalah pada pimpinan. Perubahan hanya akan tercapai bila pimpinan memiliki tujuan yang jelas dalam menerapkan EBLM. Pimpinan harus bersikap netral terhadap ide baru sampai melihat bukti dan mengujinya. Namun sayangnya, di berbagai organisasi banyak pimpinan lebih banyak berdiskusi dan menerima masukan dari orang yang dia percaya, misalnya teman atau senior, tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya data dan analisis (Fisher dan Robertson, 2007; Lakos, 2007).

2.3 Bukti: Jenis dan Tingkat Prioritas Penggunaan

Bukti (*evidence*) dalam EBL diartikan sebagai penguatan dari sebuah klaim. Bukti harus memenuhi tiga syarat, yaitu relevan dengan permasalahan yang dihadapi pada waktu tertentu, dapat dipercaya, dan kuat. Untuk memenuhi nilai relevan biasanya bukti berlaku spesifik dan lokal. Bukti yang utama dalam konsep *evidence-based* selalu mengacu pada hasil penelitian yang disebut *hard evidence*. Selain hasil penelitian, ada bukti lain seperti pengalaman praktisi dan pengetahuan pakar yang disebut *soft evidence* (Koufogiannakis, 2013).

Pemilihan bukti yang akan digunakan harus mempertimbangkan tingkat bukti. Bukti dalam EBL disusun dalam hierarki yang memberikan skala prioritas penggunaan pada hierarki yang lebih tinggi. Semakin tinggi hierarki menunjukkan bukti tersebut semakin kuat dan diperoleh dari metode penelitian dengan bias yang minimal. Tabel 1 menampilkan tingkat bukti dalam EBL. Hierarki ini disusun oleh Eldredge yang bekerja di perpustakaan kesehatan mengadopsi tingkat bukti dalam EBM. Hal ini menyebabkan beberapa metode dalam hierarki tersebut jarang digunakan dalam IPI seperti *randomized controlled trials* (RCTs). Contoh judul penelitian memberikan gambaran aplikasi metode penelitian tersebut dalam IPI, bukan untuk merekomendasikan sebagai contoh terbaik. Bukti yang berada pada tingkat paling atas adalah review sistematis hasil-hasil kajian karena dinilai tingkat biasnya paling kecil, sedangkan penelitian kualitatif pada tingkat paling bawah karena dinilai lebih subjektif sehingga biasanya lebih besar. Hal ini menjadi salah satu masalah bukti hasil penelitian dalam EBL karena sebagian besar penelitian dalam kepustakawanan adalah kualitatif yang dinilai kurang pasti pengukurannya (Koufogiannakis, 2013).

Tabel 1. Tingkat Bukti dalam EBL (Eldredge, 2000)

No.	Jenis bukti	Contoh judul penelitian
1	Systematic reviews of multiple rigorous research studies	Saxton, ML. 1997. Reference service evaluation and meta- analysis: findings and methodological issues. <i>Libr Q</i> , 67(3):267–89.
2	Systematic reviews of multiple but less rigorous research studies, such as case studies and qualitative methods	
3	Randomized controlled trials (RCTs)	Rosenberg, <i>et al.</i> 1998. Improving searching skills and evidence retrieval. <i>JR Coll Physicians Lond</i> , 32(6): 557–63
4	Controlled-comparison studies	Eldredge, JD. 1997. Identifying peer-reviewed journals in clinical medicine. <i>Bull Med Libr Assoc</i> , 85(4):418–22.
5	Cohort studies	Blecic, DD. 2000. Monograph use at an academic health sciences library: the first three years of shelf life. <i>Bull Med Libr Assoc</i> , 88(2):145–51
6	Descriptive surveys	Marshall, JG. 1992. The impact of the hospital library on clinical decision making: the Rochester study. <i>Bull Med Libr Assoc</i> , 80(2):169–78.
7	Case studies	- (tidak diberikan contoh)
8	Decision analysis	Tucker et al. 1998. Cost-effectiveness analysis of a rotavirus immunization program for the United States. <i>JAMA</i> , 279(17):1371–6
9	Qualitative research (focus groups, ethnographic observations, historic, etc.)	Robbins K, Holst R. 1990. Hospital library evaluation using focus group interviews. <i>Bull Med Libr Assoc</i> , 78(3): 311–3

2.4 Tahapan Penerapan

Terdapat beberapa model tahapan penerapan EBL. Semua model terdiri atas lima langkah, namun berbeda istilah yang digunakan. Salah satu model adalah yang dikemukakan oleh Koufogiannakis pada tahun 2013 (Koufogiannakis, 2013). Model tahapan penerapan EBL tersebut, sebagai berikut:

- 1) *Articulate*: mengetahui masalah dan mendefinisikannya dengan baik;
- 2) *Assemble*: mengumpulkan bukti dari berbagai sumber yang sesuai;
- 3) *Asses*: pertimbangkan antarsumber bukti yang paling kuat dan tepat;
- 4) *Agree*: pilih yang sesuai dan laksanakan;
- 5) *Adapt*: evaluasi yang sedang diterapkan apakah sesuai dengan tujuan.

Sebelumnya, Eldredge (2012) juga mengemukakan tahapan penerapan yang serupa, terdiri atas:

- 1) Formulasi pertanyaan sesuai masalah yang dihadapi;
- 2) Mencari sumber informasi dan bukti;
- 3) Mengkritisi bukti yang tersedia;
- 4) Menentukan bukti yang tepat dan menerapkannya;
- 5) Mengevaluasi hasil penerapan.

3. METODE

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah studi literatur dan data sekunder dikaitkan dengan kondisi kepastakawanan di Indonesia. Literatur yang dikaji adalah mengenai *evidence-based practice*, *evidence-based librarianship*, *evidence-based management*, manajemen perpustakaan, penelitian di bidang IPI, dan kepastakawanan di Indonesia.

Data sekunder yang digunakan adalah mengenai ketersediaan dan akses terhadap bukti ilmiah serta faktor yang memengaruhinya. Beberapa kajian sebelumnya menunjukkan bahwa hal utama yang harus diperhatikan dalam penerapan EBLM adalah ketersediaan dan akses terhadap bukti ilmiah khususnya publikasi hasil penelitian (Dalrymple, 2010; Eldredge, 2010; Wilson, 2013). Data ketersediaan bukti IPI di Indonesia dan aksesnya berdasarkan produktivitas publikasi dan basis data jurnal yang dilanggan. Ketersediaan ini erat kaitannya dengan jumlah dan kualitas SDM serta dukungan dari manajemen perpustakaan. Hasil triangulasi data dan teori ini kemudian dianalisis secara deskriptif. Rincian data sekunder yang digunakan sebagai berikut:

- 1) Data publikasi IPI Indonesia di jurnal internasional yang diakses dari Scimago Journal Ranking (ScimagoJR). ScimagoJR merupakan portal indikator ilmiah berdasarkan basis data Scopus Elsevier. ScimagoJR dapat diakses di <http://scimagojr.com>. ScimagoJR dipilih karena data sudah dianalisis dengan berbagai indikator ilmiah, mudah digunakan, dan menyajikan data publikasi bidang IPI; sedangkan basis data Scopus di situs web www.scopus.com dan Web of Science (www.webofknowledge.com) yang biasa dipakai untuk mengukur produktivitas ilmiah hanya menyajikan data artikel sampai bidang ilmu sosial atau humaniora, tidak terperinci sampai bidang IPI yang berada dibawah kedua bidang tersebut.
- 2) Data jurnal nasional bidang IPI menggunakan data direktori jurnal di basis data jurnal ilmiah Indonesia (*Indonesian Scientific Journal Basis data/ISJD*) Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah (PDII) LIPI. ISJD merupakan salah satu basis data jurnal ilmiah terlengkap di Indonesia yang dapat diakses melalui <http://jurnal.pdii.lipi.go.id/index.php/Direktori-Jurnal.html>.
- 3) Basis data jurnal daring digunakan data yang dilanggan oleh PNRI dan perpustakaan IPB. Kedua basis data dipilih sebagai perwakilan untuk melihat ketersediaan dan akses terhadap literatur IPI luar negeri.

- 4) Data SDM bidang IPI meliputi data pustakawan yang terdapat di basis data pustakawan (<http://pustakawan.pnri.go.id/pustakawan>), data peneliti IPI di LIPI, serta akademisi di perguruan tinggi yang menyelenggarakan program ilmu perpustakaan dan informasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Urgensi EBLM dalam Menjawab Permasalahan Kepustakawanan di Indonesia

Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia (ISIPPI) pada tahun 2009 mengidentifikasi berbagai permasalahan dalam kepustakawanan Indonesia. Permasalahan tersebut meliputi empat isu besar, yaitu profesionalisme pustakawan, akuntabilitas dan kredibilitas, pendanaan dan standardisasi, serta landasan ilmu dan pemanfaatan teknologi informasi (ISIPPI, 2009). Empat isu tersebut dijabarkan dalam 15 hal yang bila dipelajari lebih lanjut terjadi karena manajemen yang tidak tepat. Manajemen yang keliru ini meliputi manajemen SDM (pengelolaan, pendidikan, dan pengembangan SDM yang serampangan); perencanaan dan pelaksanaan program (terutama lintas program yang kurang baik); pendanaan yang kurang; serta pengukuran kinerja dan evaluasi yang tidak tepat.

Cossette (2009) menyatakan bahwa berbagai permasalahan dalam kepustakawanan, mulai dari manajemen dalam perpustakaan sampai belum besarnya dampak perpustakaan bagi masyarakat, disebabkan oleh persepsi dan sikap pustakawan mengenai kepustakawanan. Sebagian besar pustakawan menganggap kepustakawanan adalah perihal metode praktis dalam mengelola bahan pustaka dan menyebarkannya kepada masyarakat. Sangat sedikit pustakawan yang menganggap kepustakawanan sebagai ilmu bahkan menyadari pentingnya ilmu dan filosofi dibalik pekerjaan mereka. Hal ini menyebabkan ilmu perpustakaan berkembang lambat dan praktik dalam perpustakaan juga tidak mengalami kemajuan yang pesat. Oleh karena itu, kunci dari semua permasalahan dalam kepustakawanan adalah mengembangkan ilmu perpustakaan dan menerapkannya kembali dalam mengelola perpustakaan.

Disinilah pendekatan manajemen yang berbasis pada bukti hasil penelitian seperti EBLM penting untuk diterapkan. Dalam EBLM, pengelolaan perpustakaan harus berdasarkan fakta, riset, dan analisis sebagai budaya dalam pengambilan keputusan (Lakos, 2007). Hal ini akan mendorong dilakukannya penelitian dalam perpustakaan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Melaksanakan penelitian sebagai bagian dari pekerjaan pustakawan akan meningkatkan kualitas pribadi pustakawan karena dalam penelitian akan memunculkan pola pikir yang teratur, logis, fleksibel, peka terhadap masalah, kreatif, imajinatif, merumuskan masalah dengan tepat, kemauan untuk terus belajar, ketelitian, dan komunikasi (Jacobs dan Berg, 2013). Bagi organisasi, penelitian akan menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan, karena penelitian didesain berdasarkan permasalahan yang ada. Bagi profesi, penelitian akan mengembangkan keilmuan serta meningkatkan koordinasi dan jaringan untuk berbagi pengetahuan. Hal ini sekaligus akan meningkatkan prestise dan peran profesi dikemudian hari (Hall, 2011).

4.2 Tantangan Penerapan EBLM

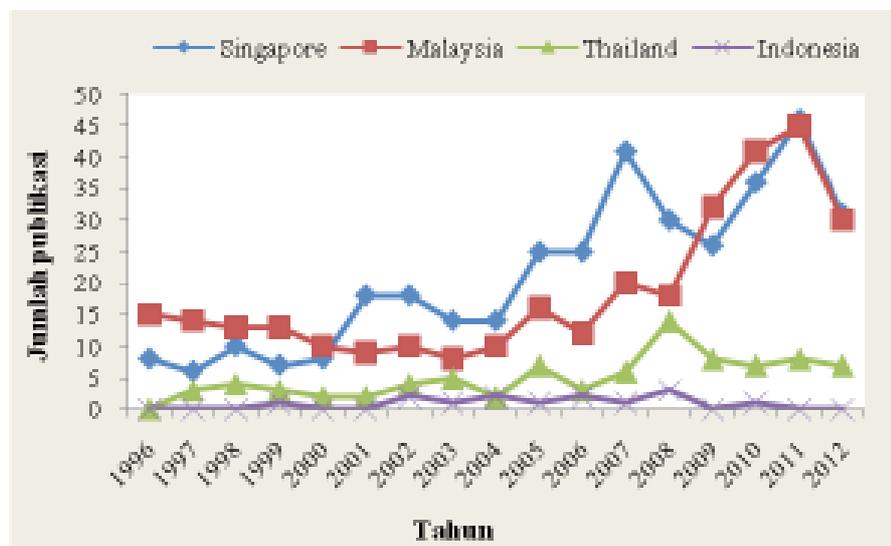
4.2.1 Ketersediaan dan akses terhadap bukti ilmiah

Dalrymple (2010) mengidentifikasi tantangan dalam pengembangan EBL adalah terkait dengan penyediaan bukti, akses terhadap bukti yang diperlukan, dan strategi penerapan bukti. Untuk menerapkan EBLM diperlukan bukti ilmiah terkait dengan pengambilan keputusan dalam setiap tahapan manajemen. Tahapan ini dimulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian sampai pengukuran kinerja dan evaluasi baik terhadap koleksi, program, layanan, sarana, SDM, maupun pemasaran (Stueart dan Moran, 2007; Johnson, 2009).

Bukti dapat disediakan dari publikasi penelitian dalam negeri dan melanggan jurnal luar negeri. Publikasi dalam negeri lebih diutamakan karena dalam EBL bukti harus sesuai dengan kebutuhan dan bersifat lokal (Koufogiannakis, 2013). Walaupun begitu, ketersediaan dan akses terhadap artikel luar negeri juga penting baik sebagai rujukan akademis, riset, maupun publikasi.

1. Publikasi internasional

Publikasi Indonesia di ScimagoJR memperlihatkan jumlah publikasi IPI Indonesia selama 18 tahun sejak tahun 1996 sampai tahun 2012 hanya sebanyak 14 artikel. Tidak setiap tahun ada artikel yang dipublikasikan oleh penulis dari Indonesia seperti tahun 2009, 2011, dan 2012 dimana publikasi Indonesia tidak ada (nol) (Tabel 2). Jumlah publikasi IPI Indonesia juga tidak ada kenaikan dari tahun ke tahun. Kondisi ini sangat jauh berbeda dengan negara Malaysia dan Singapura dimana publikasi internasional bidang IPI mereka tumbuh dengan pesat. Publikasi mereka sudah stabil di angka 30-40 artikel per tahun. Negara ASEAN lain yaitu Thailand juga lebih baik dari Indonesia dimana setiap tahun ada publikasi yang mereka hasilkan walaupun masih dibawah 10 artikel per tahun. Gambar 1 dan Tabel 2 memperlihatkan grafik pertumbuhan publikasi internasional bidang IPI beberapa negara ASEAN. Grafik ini memperlihatkan pertumbuhan publikasi IPI internasional Indonesia masih jauh di bawah Malaysia, Singapura, dan Thailand.



Gambar 1. Pertumbuhan publikasi internasional bidang IPI beberapa negara ASEAN

Tabel 2. Jumlah Publikasi Internasional Bidang IPI Beberapa Negara ASEAN

Tahun	Negara			
	Singapore	Malaysia	Thailand	Indonesia
1996	8	15	0	0
1997	6	14	3	0
1998	10	13	4	0
1999	7	13	3	1
2000	8	10	2	0
2001	18	9	2	0
2002	18	10	4	2
2003	14	8	5	1
2004	14	10	2	2
2005	25	16	7	1
2006	25	12	3	2
2007	41	20	6	1
2008	30	18	14	3
2009	26	32	8	0
2010	36	41	7	1
2011	46	45	8	0
2012	31	30	7	0
	363	316	85	14

2. Publikasi nasional

Di tingkat nasional ketersediaan bukti ilmiah dapat dilihat dari kuantitas dan kualitas jurnal IPI nasional. Data di direktori jurnal ISJD menunjukkan jumlah jurnal ilmiah bidang IPI sekitar 40-50 judul jurnal. Jumlah ini hanya sekitar 2% dari 2.000-an jurnal yang ada di Indonesia saat ini. Jumlah ini tidak pasti karena ada beberapa jurnal yang sudah tidak terbit lagi. Selain itu ada juga beberapa jurnal yang dapat dijadikan indikator perkembangan IPI di Indonesia namun tidak setiap tahun terbit.

Dari segi konten, semua jurnal IPI berisi ilmu kepastakawanan secara umum. Sampai saat ini belum ada jurnal yang fokus ke manajemen perpustakaan. Secara kualitas, belum ada jurnal IPI yang terakreditasi, baik oleh LIPI maupun Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (DIKTI). Akreditasi umumnya terhambat karena penerbitannya belum bisa teratur yang disebabkan tidak selalu ada artikel yang siap terbit atau ada tapi tidak memenuhi kriteria jurnal. Selain itu, belum semua artikel dalam jurnal tersebut merupakan artikel ilmiah. Banyak jurnal yang isinya berupa opini ataupun bila mengarah ke artikel ilmiah, belum semua jurnal memiliki mitra bestari untuk melakukan review. Padahal, rutinitas terbit dan adanya mitra bestari merupakan syarat utama akreditasi. Kondisi ini merupakan tantangan serius dalam menerapkan EBLM, karena untuk bisa dijadikan bukti, artikel harus dihasilkan dari penelitian yang dilakukan dengan metode yang sistematis, terverifikasi,

dan menggunakan prosedur standar (Yildiz, 2012).

3. Basis data daring

Terkait dengan ketersediaan dan akses terhadap literatur luar negeri, saat ini sudah banyak perpustakaan yang melanggan basis data jurnal daring yang didalamnya juga terdapat jurnal bidang IPI. Namun, perlu ada kajian mengenai pemanfaatan jurnal tersebut oleh SDM IPI untuk pengambilan keputusan atau rujukan dalam meningkatkan kualitas pekerjaan. Di beberapa perpustakaan, sering kali pustakawan sibuk menyediakan bukti ilmiah untuk mendukung pekerjaan pengguna perpustakaan seperti peneliti dan industri, namun mereka sendiri tidak menggunakan bukti untuk mendukung aktivitasnya (Fisher dan Robertson, 2007).

Analisis terhadap basis data Scencedirect yang dilanggan perpustakaan IPB menunjukkan tersedianya 20-an jurnal IPI yang dilanggan, namun hanya 4 yang masuk dalam 50 besar Scimago Journal Ranking. Dari serial basis data yang dilanggan PNRI (<http://e-resources.pnri.go.id/>), ada 96 jurnal elektronik bidang IPI namun hanya 5 yang masuk peringkat 50 Scimago Journal Ranking. Empat jurnal diantaranya memberi embargo 1 tahun terakhir tidak dapat diakses teks lengkapnya. Hal ini memang banyak terjadi dalam melanggan basis data jurnal daring oleh perpustakaan di Indonesia, dimana beberapa jurnal memberi embargo untuk terbitan 1 atau 2 tahun terakhir dan ada beberapa jurnal IPI berkualitas justru tidak masuk dalam paket yang dilanggan (Sulistyo-Basuki, 2013).

Penyebab rendahnya ketersediaan literatur IPI di suatu negara dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jumlah profesional dan asosiasi IPI, jumlah pendidikan IPI, kemakmuran negara yang memengaruhi komitmen pendanaan khususnya untuk riset, bahasa nasional (bahasa Inggris lebih diuntungkan untuk publikasi internasional), sistem insentif dan promosi, kebijakan nasional untuk publikasi, investasi riset dan sarana teknologi di tingkat nasional (Park, 2008). Dari beberapa faktor tersebut Indonesia memang masih lemah seperti pendanaan dan infrastruktur untuk penelitian karena kebijakan nasional belum memprioritaskan hal ini. Faktor lain yang perlu dicermati adalah jumlah dan kualitas SDM serta manajemen dalam organisasi IPI yang belum mendukung budaya riset dan publikasi.

4.2.2 SDM penyedia bukti ilmiah (jumlah, kualitas, dan pengelolaanya)

Ketersediaan bukti ilmiah hasil riset dalam negeri sangat ditentukan oleh jumlah dan kualitas SDM IPI. SDM ini meliputi pustakawan, peneliti bidang IPI di perpustakaan atau lembaga, dan akademisi IPI di perguruan tinggi.

1. Pustakawan

Pustakawan merupakan profesi bidang IPI yang paling banyak. Data pustakawan di Pusat Pengembangan Pustakawan PNRI (<http://pustakawan.pnri.go.id/pustakawan>) pada tahun 2014 ada sekitar 3.300 pustakawan yang berasal dari 746 instansi. Di banyak negara, penelitian dan publikasi oleh pustakawan masih sedikit. Hambatan publikasi pustakawan dibagi menjadi dua, yaitu persepsi diri pustakawan dan dukungan sistem/manajemen dalam organisasi. Menurut Jacobs dan Berg (2013) sebenarnya masalah penelitian dan publikasi bagi pustakawan bukan keterampilan, melainkan

kebiasaan dan pola pikir. Pustakawan banyak belum menjadikan penelitian sebagai kebutuhan dan sibuk dengan rutinitas harian sehingga tidak ada waktu untuk melakukan penelitian. Selain itu, banyak pustakawan merasa tidak menguasai metode penelitian maupun penulisan ilmiah. Padahal dalam pendidikan formal atau pelatihan sebelum menjadi pustakawan selalu ada materi mengenai metode penelitian. Begitupun di Indonesia, setidaknya dari seluruh pustakawan yang ada sekitar 54% adalah lulusan S-1 yang sudah belajar metode penelitian, sehingga ada 1.797 pustakawan yang berpotensi melakukan penelitian dan publikasi. Jumlah ini merupakan aset yang sangat besar bagi penyediaan bukti ilmiah untuk penerapan EBL di Indonesia.

Melakukan kajian dan publikasi ilmiah sebenarnya merupakan salah satu kegiatan pustakawan. Kegiatan ini termasuk dalam sistem penilaian jabatan fungsional pustakawan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya. Dalam peraturan ini, kajian termasuk dalam unsur kegiatan Pengkajian Pengembangan Perpustakaan, Dokumentasi dan Informasi yang dapat dilakukan mulai tingkat pustakawan pertama.

Ada tiga hal yang menarik dalam peraturan ini yaitu kegiatan publikasi terpisah dari kegiatan pengkajian, pelaksana kajian dibatasi berdasarkan jenjang jabatan, dan tidak ada kewajiban publikasi dalam jumlah tertentu untuk menjadi pustakawan utama.

- 1) Publikasi berada dalam kegiatan Pengembangan Profesi yaitu membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang perpustakaan, dokumentasi, dan informasi. Jadi, dalam peraturan ini kegiatan pengkajian tidak harus dipublikasikan. Laporan pengkajian yang disahkan oleh atasan tetapi tidak dipublikasikan mendapat penilaian walaupun nilai publikasi jauh lebih besar. Kondisi ini secara tidak langsung dapat menyebabkan publikasi pustakawan yang dapat diakses oleh masyarakat lebih sedikit jika dibandingkan dengan yang dihasilkan.
- 2) Kegiatan pengkajian diperinci pelaksanaannya yaitu pustakawan pertama hanya bisa sampai mengumpulkan data, mengolah data dilakukan oleh pustakawan muda, dan menganalisis dilakukan oleh pustakawan madya. Adapun untuk publikasi dapat dilakukan oleh semua jenjang. Ketentuan yang membatasi pelaksana dalam melakukan kajian perlu dievaluasi kembali untuk memberikan peluang bagi pustakawan pertama yang sudah dapat melakukan analisis dengan bagus dan dapat melakukan publikasi.
- 3) Pustakawan utama merupakan jabatan paling tinggi dalam fungsional pustakawan, namun terkait dengan publikasi, tidak ada ketentuan pustakawan utama harus melakukan publikasi dengan kualitas tertentu. Kondisi ini berbeda dengan fungsional lain seperti profesor di perguruan tinggi atau profesor riset di lembaga penelitian dengan pangkat IV-e, mereka harus punya publikasi internasional dalam jumlah tertentu. Saleh (2013) mengusulkan pentingnya ketentuan minimal publikasi untuk menjadi pustakawan utama yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pustakawan. Ketentuan publikasi ini juga penting untuk mengembangkan ilmu perpustakaan dan prestise profesi pustakawan.

2. Peneliti IPI

Profesi yang banyak melakukan kajian dan publikasi adalah peneliti. Di Indonesia, penelitian bidang IPI belum menjadi prioritas bahkan belum mendapatkan nama kepakaran khusus di LIPI sebagai induk jabatan fungsional peneliti di Indonesia. Dalam kepakaran LIPI, kepustakawanan masuk dalam kepakaran Jurnalistik, Keperpustakaan, dan Kurator. Karena nama kepakaran ini tidak dapat menampung ilmu dan teknologi informasi, beberapa peneliti yang sebenarnya masuk IPI justru tidak memilih kepakaran ini. Mereka memilih masuk kepakaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), sub kepakaran Sistem Informasi. Saat ini, bidang kepakaran LIPI sedang ditata kembali untuk mengakomodasi bidang ilmu yang belum masuk di dalamnya.

Dari sisi jumlah, peneliti IPI sangat sedikit. Jumlah peneliti di PDII hanya 10 orang, sedangkan masih ada beberapa peneliti IPI di satuan kerja atau lembaga lain namun jumlahnya lebih sedikit. Sementara itu jumlah peneliti di LIPI saat ini ada 1.543 dari sekitar 8.761 peneliti di seluruh Indonesia. Persentase peneliti IPI sangat kecil jika dibandingkan dengan peneliti bidang ilmu lain.

Posisi peneliti di PDII sebenarnya mendukung konsep EBL karena peneliti juga sebagai praktisi (*researcher-practitioners*). Peneliti terlibat langsung dalam aktivitas proses bisnis perpustakaan, seperti pengolahan dan pelayanan informasi. Hal ini menyebabkan peneliti IPI tidak bisa fokus dalam melakukan penelitian, sehingga mengakibatkan publikasi hasil-hasil penelitiannya menjadi rendah. Selain itu, peneliti IPI belum memiliki kelompok penelitian secara formal. Dana penelitian di bidang IPI juga belum dapat mengakomodasi semua peneliti yang ada. Oleh karena itu, diperlukan dukungan manajemen terhadap kegiatan penelitian dan publikasi di PDII. Hal ini sangat penting karena PDII memiliki SDM yang berkualitas dan potensial untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian dan publikasi IPI di Indonesia.

3. Akademisi

Akademisi terdiri atas dosen dan mahasiswa. Jumlah akademisi sangat besar karena satu perguruan tinggi (PT) dapat menyelenggarakan beberapa program pendidikan. Program studi IPI di Indonesia terdiri atas 1 program S3, 5 program S-2, 18 program S-1, 26 program D-3, dan 1 program D-2. Akademisi memiliki lingkungan yang kondusif untuk penelitian dan publikasi. Namun, IPI masih menghadapi kendala dalam pelaksanaan penelitian karena penyelenggara pendidikan masih banyak yang berorientasi teknis, belum mengarah pada filsafat, ilmu, dan metodologi penelitian yang teruji (ISIPII, 2009). Selain itu, beberapa PT yang menyelenggarakan pendidikan IPI memiliki lebih dari 1 tingkat program, sehingga pendidik (dosen) disibukkan dengan jadwal kegiatan mengajar, yang berakibat pada terhambatnya kegiatan penelitian dan publikasi (Sulistyo-Basuki, 2013).

4.2.3 SDM Pelaksana EBLM

Tantangan ketiga dalam penerapan EBLM ada pada pimpinan, pustakawan, dan SDM lain di perpustakaan untuk menggunakan bukti ilmiah sebagai dasar dalam aktivitas mereka. Walaupun belum ada kajian bagaimana pustakawan dalam mengambil keputusan, namun beberapa literatur menyatakan bahwa pustakawan lebih menyukai hal praktis dan

melaksanakan kegiatan kepastakawanan sebagai rutinitas harian. Pustakawan umumnya melaksanakan tugasnya sudah berlangsung lama, dari tahun ke tahun melaksanakan aktivitas yang sama. Ketika perlu mengambil keputusan terkait dengan pekerjaan, mereka akan menggunakan pengalaman mereka atau kelompok mereka sendiri dibandingkan menggunakan hasil penelitian dari luar. Hal ini juga yang menyebabkan ilmu dan praktek perpustakaan berkembang lambat (ISIPII, 2009; Fisher dan Robertson, 2007).

Selain pustakawan, sikap manajer dan pimpinan juga merupakan tantangan dalam menerapkan EBLM. Dibutuhkan perubahan persepsi dan sikap manajer perpustakaan khususnya dalam proses pengambilan keputusan. Ada dua langkah yang dapat diterapkan secara bertahap untuk menghasilkan perubahan dalam budaya pengambilan keputusan dalam organisasi. Langkah pertama adalah kebutuhan terhadap adanya bukti dalam setiap pengambilan keputusan. Cara terbaik membuat organisasi menggunakan EBLM adalah pimpinan harus selalu menekankan pentingnya dasar bukti ilmiah dengan menanyakan bukti yang digunakan oleh setiap orang ketika mereka mengusulkan pendapat atau mengambil keputusan. Langkah kedua adalah menguji logika dan mengevaluasi secara kritis dasar bukti ilmiah yang disampaikan (Pfeffer dan Sutton, 2006).

4.3 Rekomendasi Pendukung Penerapan EBLM

Berdasarkan kondisi kepastakawanan Indonesia, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mendukung penerapan EBLM.

1. Sistem yang mendukung penguatan penelitian dan publikasi IPI

Di banyak negara belum banyak dukungan yang diberikan baik kepada perpustakaan maupun pustakawan untuk meningkatkan budaya penelitian dan publikasi, termasuk di Indonesia. Dukungan formal dalam skala nasional dalam bentuk lembaga diperlukan untuk memberikan informasi peluang riset dan publikasi; akses pendanaan; mendorong dialog peneliti dengan pemberi dana; mendorong penerapan penelitian ke praktik pengelolaan perpustakaan; mengembangkan strategi riset IPI nasional; dan meningkatkan kapasitas penelitian IPI baik dari sisi individu maupun organisasi. Bentuk kegiatan yang dapat dilaksanakan antara lain kegiatan lokakarya yang intensif, mentoring, berbagi pengetahuan, dan membangun sarana riset (Jacobs dan Berg 2013; Hall, 2011). Salah satu contoh lembaga yang dibentuk untuk memberikan dukungan terhadap penelitian di perpustakaan adalah *The Library and Information Science Research Coalition* di Inggris Raya tahun 2010. Asosiasi ini awalnya bertujuan untuk mendukung, bekerja, merencanakan, dan mengkampanyekan praktik berbasis riset serta pembelajaran sepanjang hayat untuk menghasilkan informasi yang berkualitas tinggi (Hall, 2011).

2. Peneliti-praktisi di bidang kepastakawanan

Istilah *researcher-practitioners* sudah banyak digunakan di beberapa negara maju dalam bidang medis dan pendidikan, seperti bidan peneliti dan guru peneliti. Definisi-*researcher-practitioners* adalah praktisi yang melakukan penelitian sesuai dengan bidangnya dengan metode yang mendalam dan bersifat lokal, untuk mengevaluasi dan mengembangkan pekerjaannya. Selain melakukan penelitian, praktisi tetap memberikan layanan profesi dan melaksanakan riset sesuai dengan layanan yang diberikan. Hal ini dapat memberikan

keuntungan bagi organisasi karena tidak mengurangi pekerjaan rutin dan bahkan dapat meningkatkan kualitas pekerjaannya (Wilson, 2013).

Pekerjaan peneliti-praktisi ini harus dibedakan dengan penelitian yang selama ini banyak dilakukan oleh pustakawan untuk meraih angka kredit dan promosi jabatan. Bagi seorang peneliti-praktisi pustakawan, penelitian dilakukan karena memiliki motivasi lebih yaitu untuk memenuhi keingintahuan dan minatnya, meningkatkan kepuasan dalam bekerja, dan meningkatkan kualitas profesionalnya. Tantangan yang muncul dalam model pekerjaan ini adalah pembagian waktu, konflik peran, keseimbangan kualitas, dukungan finansial dan manajemen. Dalam perpustakaan tidak harus semua praktisi melakukan riset, namun peran praktisi harus ada dan lembaga harus melegitimasi peran tersebut (Wilson, 2013). Pola pekerjaan seperti ini sebenarnya mirip dengan peneliti yang ada di PDII LIPI. Oleh sebab itu, perlu adanya dukungan formal dengan ketentuan yang jelas dari manajemen sehingga peneliti-praktisi dapat sukses menjalankan perannya.

3. Repositori subyek

Repositori subjek merupakan salah satu jenis repositori digital yang berisi karya ilmiah bidang ilmu tertentu yang dapat diakses oleh masyarakat luas (Bawden dan Robinson 2012). Repositori subjek khusus bidang IPI penting untuk dikembangkan di Indonesia. Saat ini akses terhadap bukti ilmiah bidang IPI masih terbatas akibat tidak adanya basis data khusus IPI. Di Indonesia literatur kelabu IPI jumlahnya sangat banyak, namun tidak terkumpul dalam satu tempat sehingga sulit untuk diakses. Padahal, dasar dari EBL adalah menerapkan hasil penelitian dalam praktik. Dalam EBL diperlukan bukti ilmiah yang cukup dan dapat diakses dengan mudah. Oleh karena itu, menyusun ringkasan bukti hasil penelitian yang dapat diakses secara luas seperti repositori subjek merupakan langkah awal yang tepat dalam membangun EBL (Dalrymple, 2010).

5. KESIMPULAN

Evidence-based library management (EBLM) penting diterapkan di perpustakaan di Indonesia. EBLM akan mendorong pimpinan dan pustakawan untuk selalu belajar dan menemukan bukti yang tepat, baik melalui literatur maupun dengan melakukan penelitian. Kemauan dan kemampuan untuk terus belajar merupakan kunci bagi pustakawan untuk meningkatkan kualitas profesinya. Bagi perpustakaan, penggunaan bukti dalam manajemen akan membuat organisasi lebih inovatif, berkembang, tidak stagnan, dan semakin berdampak bagi masyarakat luas. Bagi perkembangan ilmu perpustakaan dan informasi (IPI), EBLM dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian serta publikasi, sehingga IPI di Indonesia akan tumbuh pesat. Melalui penerapan EBLM, permasalahan IPI diharapkan akan dapat diselesaikan.

Beberapa tantangan dalam penerapan EBLM di Indonesia adalah ketersediaan bukti publikasi hasil penelitian masih rendah, terbatasnya akses terhadap literatur dalam negeri dan luar negeri, serta SDM yang belum mendukung penyediaan dan penggunaan bukti. Ketiganya dapat diatasi dengan adanya dukungan dari kebijakan dan program dalam skala nasional untuk mendorong penelitian dan publikasi IPI. Dalam skala organisasi, manajemen dapat mendukung dengan melegitimasi pola peneliti-praktisi pustakawan sehingga penelitian dalam perpustakaan dapat berkembang. Selain itu, lembaga profesi pustakawan dapat mengembangkan repositori subjek IPI untuk mendukung penyediaan bukti

yang lengkap dan mudah diakses.

DAFTAR PUSTAKA

- Bawden, D. dan Robinson, L. 2012. Introduction to information science. London (UK): Facet Publishing.
- Booth, A. 2000. Exceeding expectations: achieving professional excellence by getting research into practice. *LIANZA*. Christchurch, New Zealand, 15–18 Oktober.
- Booth, A. 2003. Bridging the research – practice gap? The role of evidence based librarianship. *New Rev. Inf. Libr. Res.*, (9)1:3–23.
- Cossette, A. 2009. Humanism and Libraries: an essay on the philosophy of librarianship. Duluth, Minnesota (USA): Library Juice Press.
- Crumley, E. dan D. Koufogiannakis. 2002. Developing evidence-based librarianship: practical steps for implementation. *Health Info. Libr. J.*, (19)2:61–70.
- Dalrymple, P.W. 2010. Applying Evidence in Practice: what we can learn from healthcare. *Evid. Based Libr. Inf. Pract.*, (5)1:43–47.
- Eldredge, J. 2000. Evidence-based librarianship: an overview. *Bull. Med. Libr. Assoc.*, (88)4:289–302.
- Eldredge, J. 2010. Evidence-based librarianship: searching for the needed EBL evidence. *Med Ref Serv Q*, (19)3:1–18.
- Eldredge, J. 2012. The Evolution of evidence based library and information practice, Part I: defining EBLIP. *Evid. Based Libr. Inf. Pract.*, (7)4:139–145.
- Fisher, B. dan D. Robertson. 2007. Evidence-based management as a tool for special libraries. *Evid. Based Libr. Inf. Pract.* (2)4:36–45.
- Hall, H. 2011. UK library and information science research matters. *Libr. Inf. Sci. Res.*, (33)1:89–91.
- Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia (ISIPII). 2009. Tantangan dan permasalahan kepustakawanan Indonesia.: http://isipii-librarian-indonesia.blogspot.com/2009_01_01_archive.html. (Diakses 28/2/2014).
- Jacobs, H. L. M. dan S. A. Berg. 2013. By Librarians, For Librarians: Building a Strengths-Based Institute to Develop Librarians' Research Culture in Canadian Academic Libraries. *J. Acad. Librarianship*, (39)3:227–231.
- Johnson, P. 2009. Fundamentals of collection development and management, 2nd ed. Chicago (USA): American Library Association.
- Koufogiannakis, D. 2013. EBLIP7 Keynote: what we talk about when we talk about evidence. *Evid. Based Libr. Inf. Pract. Featur.*, (8)4:6–17.
- Lakos, A. 2007. Evidence-Based Library Management: The Leadership Challenge. *Portal Libr. Acad.*, (7)4:431–450.
- Online Computer Library Center (OCLC). 2010. *Perceptions of Libraries 2010: Context and Community*. <http://www.oclc.org/content/dam/oclc/reports/2010perceptions/> 2010perceptions_all.pdf. (Diakses 28/2/2014).
- Park, T. K. 2008. Asian and Pacific Region Authorship Characteristics. *Leading Library and Information Science Journals. Ser. Rev.*, (34)4:243–251.
- Patridge, H. 2007. The Practitioner's experience and conception of evidence based library and information practice: an exploratory analysis. *4th International Evidence Based Library and Information Practice Conference*. Chapel Hill-Durham NC USA, 6–11 Mei.
- Pfeffer J. dan R. I. Sutton. 2006. Evidence-based management. *Harv. Bus. Rev.*, (84)1: 62–74.
- Pfeffer J. dan R. I. Sutton. 2006. *Hard Facts, Dangerous Half-Truths and Total Nonsense: Profiting From Evidence-Based Management*. Boston (USA): Harvard Business School Press.
- Saleh, A. R. 2013. *Majelis Pustakawan Utama*. <http://rahman.staff.ipb.ac.id/2013/02/23/majelis-pustakawan-utama/> (Diakses 28/2/2014).
- Stueart, R. D. dan B. B. Moran. 2007. *Library and Information Center Management, 7th ed*. Westport (USA): Libraries Unlimited.
- Sulistyo-Basuki. 2013. ilmu perpustakaan dan informasi: perkembangan dan tantangannya di Indonesia. http://sulistyobasuki.wordpress.com/2013/03/25/ilmu-perpustakaan-dan-informasi-perkembangan-dan-tantangannya-di-indonesia/?relatedposts_exclude=122. (Diakses 25/2/2014).
- Wilson, V. 2013. Formalized Curiosity: Reflecting on the Librarian Practitioner-Researcher. *Evid. Based Libr. Inf. Pract.*, (8)1:111–117.
- Yaniasih, Mahmudi, S. Hartinah, D. T. Lastiwi, dan R. Marzuki. 2012. Involving Library in Research: Case Study of Research Library and Subject Librarian in Indonesian Institute of Sciences. *International Conference & Workshop "Making you know"*. Depok, Indonesia, 18–19 Oktober.
- Yildiz, A.K. 2012. A Review of Secondary Literature on Evidence Based Library Management. *Qual. Quant. Methods Libr.*, (1) June:63–72.